

Bab V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan aktifitas magang yang telah dilaksanakan dan pengamatan mengenai prosedur akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada dinas pertanian tanaman pangan Sumatera Barat pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur akuntansi penerimaan kas :

1. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat kedalam jurnal penerimaan kas dan memposting jurnal penerimaan kas kedalam buku besar, apabila diperlakukan akan dicatat bukti transaksi penerimaan kas kedalam buku besar.
2. Laporan yang dihasilkan dari prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD adalah neraca SKPD dan catatan atas laporan keuangan.
3. BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan kas
Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintahan yang di tunjuk dan di anggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah tersebut dilakukan dengan cara
 - a. Disetorkan melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
 - b. Disetor langsung ke bank
 - c. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga

Prosedur akuntansi pengeluaran kas

1. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat kedalam jurnal pengeluaran kas secara periodik atau berkala melakukan posting dari jurnal ke buku besar,jika di anggap perlu PPK-SKPD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan control buku besar pembantu.

2. Laporan yang di hasilkan dari prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD,terdiri dari:

a. Laporan realistik anggran SKPD

b. Neraca SKPD

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD

3. BUD bertanggung jawab atas pengelolaan pengeluaran kas daerah

Untuk mengelola kas daerah tersebut, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang baik. Penunjukan bank yang baik tersebut di tetapkan dengan keputusan kepada daerah dan di beritahukan kepada DPRD setelah menerima SPP. PPKD melakukan vertifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan kemudian menerbitkan SPM sesuai dengan karakter SPP. Berdasarkan SPM yang ada , BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dan menyetujuinya dengan menyetujuinya dengan mengeluarkan SP2D kepenggunaan anggran untuk pencairan dan bendaharawan untuk penatausahaan.apabila SPM tidak lengkap,maka dikeluarkan surat penolakan penerbitan SP2D

1.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat dapat di berikan saran sebagai berikut:

- I. Untuk terus mengevaluasi prosedur mengenai penerimaan kas pada setiap jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi lembaga,keadaan ekonomi, kemajuan teknologi serta faktor-faktor lainnya. Pengevaluasian ini di harapkan dapat menciptakan prosedur penerimaan kas yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap penerimaan kas tersebut.
- II. Untuk terus mengevaluasi prosedur mengenai pengeluaran kas pada setiap jangka waktu tertentu.dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi lembaga ,keadaan ekonomi, kemajuan teknologi serta faktor-faktor lainnya.pengevaluasian ini di harapkan dapat menciptakan prosedur pengeluaran kas yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap pengeluaran kas tersebut.

